



## LAPORAN SINGKAT

### RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VI DPR RI BIDANG PERDAGANGAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA, DAN BUMN

---

Rapat ke	: 5 (Lima)
Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Hari, Tanggal	: Kamis, 31 Oktober 2024
Pukul	: 14.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M./Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Pusporini, S.T., M.E., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI; 2. Penjelasan Mitra Kerja terhadap Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025; dan 3. Target Penyelesaian Roadmap Kementerian/Lembaga.
Hadir	: 31 orang dari 46 orang Anggota Komisi VI DPR RI;

#### I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada pukul 14.32 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 31 Oktober 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Ibu Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M.

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sepakat untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja masing-masing lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Komisi VI DPR RI meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menyampaikan secara tertulis inventarisasi permasalahan, penilaian dan kajian serta rekomendasinya untuk tahun 2024 paling lambat tanggal 5 Desember 2024.
4. Komisi VI DPR RI meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyampaikan secara tertulis inventarisasi permasalahan, penilaian dan kajian serta rekomendasinya secara berkala setiap tiga bulan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pasal 2 Poin g.
5. Komisi VI DPR RI meminta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menyampaikan secara tertulis inventarisasi permasalahan, penilaian dan kajian serta rekomendasinya secara berkala setiap tiga bulan.
6. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait urgensi usulan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan melakukan pembahasan internal terkait keputusan penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang tersebut.
7. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait usulan tambahan anggaran tahun 2025 untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
8. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.05 WIB.

**KETUA KOMISI PENGAWAS USAHA  
(KPPU)**

TTD.

**M. FANSHURULLAH ASA**

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

TTD.

**Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.**  
A-48

**KETUA BADAN PERLINDUNGAN  
KONSUMEN NASIONAL (BPKN)**

TTD.

**Dr. MUHAMMAD MUFTI MUBAROK**